



**PENGATURAN WEWENANG
PENERBITAN IZIN PENANGKARAN BURUNG
SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
(STUDI KASUS DI BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
JAWA TENGAH)**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh:

SHANIA PRILLA DAVANTI

NIM. 11000117130357

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGATURAN WEWENANG
PENERBITAN IZIN PENANGKARAN BURUNG
SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
(STUDI KASUS DI BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
JAWA TENGAH)**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

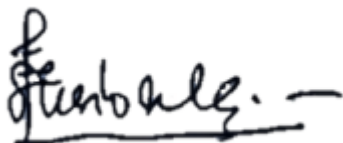
Oleh:

SHANIA PRILLA DAVANTI

NIM. 11000117130357

Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak.

Dosen Pembimbing I



F.C. Susila Adiyanta, S.H., M.Hum.

NIP. 196609111992031003

Dosen Pembimbing II



Kadek Cahya Susila Wibawa, S.H., M.H.

NIP. 198105162003121001

HALAMAN PENGUJIAN

**PENGATURAN WEWENANG
PENERBITAN IZIN PENANGKARAN BURUNG
SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
(STUDI KASUS DI BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
JAWA TENGAH)**

Dipersiapkan dan disusun
Oleh:

SHANIA PRILLA DAVANTI
NIM. 11000117130357

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal (...)

Dewan Penguji
Ketua

F.C. Susila Adiyanta, S.H., M.Hum.
NIP 196609111992031003

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

Kadek Cahya Susila Wibawa, S.H., M.H.
NIP. 198105162003121001

Sri Nur Hari Susanto, S.H., M.H.
NIP. 196110311987031002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro

Mengetahui,
Ketua Program S-1 Ilmu Hukum

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP. 196711191993032002

Marjo, S.H., M.Hum.
NIP. 196503181990031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 20 Juni 2021

Shania Prilla Davanti
NIM. 11000117130357

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat, nikmat karunia, serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dengan judul **“PENGATURAN WEWENANG PENERBITAN IZIN PENANGKARAN BURUNG SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (STUDI KASUS DI BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAWA TENGAH)”**. Penulisan Hukum ini merupakan tugas dan syarat guna menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S-1) Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta motivasi yang diberikan kepada penulis dari berbagai pihak, Penulisan Hukum ini tidak akan selesai dengan baik. Tanpa mengurangi rasa hormat, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
3. Marjo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
4. Sonhaji, S.H., M.S., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;

5. F.C. Susila Adiyanta, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I, atas segala bimbingan, arahan, pengetahuan, semangat, dan motivasi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
6. Kadek Cahya Susila Wibawa, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, atas segala bimbingan, arahan, pengetahuan, semangat, dan motivasi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
7. Lapon Tukan Leonard, S.H., M.A., selaku Dosen Wali penulis di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
8. Seluruh jajaran Dosen serta staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
9. Narasumber dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah, Shokhib Abdillah, A.Md dan Heru Sunarko, S.Hut., yang telah memperkenalkan penulis untuk mengajukan pertanyaan yang berguna untuk penyelesaian Penulisan Hukum ini, tak luput Ervina Rahmawati, S.Hut., M.Ling. yang telah menjadi narahubung penulis dengan kedua narasumber;
10. Leonardus Eri, selaku ketua Kaliwungu *Single Fighter* (KSF), yang telah meluangkan waktunya untuk membagikan ilmu serta motivasi yang berguna untuk penyelesaian Penulisan Hukum ini;
11. Jalius Afiatto, selaku penangkar burung senior di wilayah Surakarta, yang telah meluangkan waktunya untuk membagikan ilmu serta motivasi yang berguna untuk penyelesaian Penulisan Hukum ini;

12. Kedua orang tua penulis, Mazrul Herwanto dan Novita Sulistyoningtyas, yang selalu memberikan limpahan cinta, kasih sayang, kesabaran, doa, dan restu hingga selesainya Penulisan Hukum ini;
13. Kedua saudara kandung penulis, Davyto Jazmi Tsaqif dan Devara Chaitra Sausan, yang selalu menghibur dan memberi semangat pada penulis sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
14. PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menjadi penerima beasiswa program *BRILian Scholarship* Tahun 2020 serta memberikan ilmu dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
15. Pudding dan Kiwi, kedua kucing kesayangan penulis, terima kasih telah menemani penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Tanpa kalian, penulis akan kesulitan menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
16. Sahabat-sahabat penulis sejak Sekolah Menengah Atas, Rosalia Ainun Sabrinah, Satya Angga Priambudi, dan Fajar Yulianto, yang selalu memberikan kebahagiaan, motivasi, dan dukungan bagi penulis sejak Sekolah Menengah Atas sampai penulis menyelesaikan jenjang sarjana;
17. Sahabat-sahabat saya di kampus, Aleyna Azzahra Badarudin, Dety BI Monasia, dan Yuniar Rahma Putri yang telah berjuang bersama penulis sejak berstatus mahasiswa baru sampai dengan penulis menyelesaikan jenjang sarjana;

18. Para perempuan hebat yang tergabung dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan BEM FH UNDIP 2018 yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis sampai dapat menyelesaikan jenjang sarjana;
19. Teman-teman di kegiatan *volunteer* penulis, terutama *Women's March Semarang* dan *Earth Hour Semarang* yang telah memberikan penulis perspektif menarik yang berguna dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
20. Teman-teman di Bagian Hukum Administrasi Negara yang telah bersama-sama berjuang selama perkuliahan; dan
21. Semua pihak yang penulis sayangi dan cintai, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah mendukung, mendoakan, dan membantu penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima segala kritik dan saran atas Penulisan Hukum ini. Semoga Penulisan Hukum ini dapat memberi manfaat dan berguna untuk kegiatan akademis dan praktis.

Semarang, 27 April 2021

Penulis,

Shania Prilla Davanti

ABSTRAK

Perubahan status konservasi satwa *Chloropseidae* menjadi dilindungi mewajibkan pendataan kepemilikan satwa *Chloropseidae* oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah. Pendataan tersebut memberikan insentif berupa izin penangkaran. Tujuan penelitian ini adalah, *pertama*, menganalisis status hukum satwa *Chloropseidae* sebagai satwa yang dilindungi. *Kedua*, mengetahui pengaturan wewenang Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah dalam kaitannya dengan Izin Penangkaran. *Ketiga*, mengetahui praktik pendataan burung yang dilindungi, pemberian rekomendasi penangkaran burung, dan penegakan hukum kepemilikan satwa *Chloropseidae* oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis nondoktrinal dengan metode pendekatan mikro interaksional-simbolik. Penulis menganalisis secara deskriptif analitis dan diambil simpulannya dengan silogisme induksi.

Status konservasi merupakan *moral obligation* yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan untuk memberikan perlindungan khusus pada satwa. Hanya status konservasi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang mengikat satwa *Chloropseidae* secara hukum. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah tidak berwenang menerbitkan izin penangkaran burung pasca berlakunya *Online Single Submission*, namun tetap berwenang menerbitkan rekomendasi izin penangkaran burung. Wewenang menerbitkan rekomendasi izin penangkaran burung diperoleh secara atributif, sedangkan Badan Koordinasi Penanaman Modal yang menyelenggarakan *Online Single Submission* memperoleh wewenang penerbitan izin penangkaran burung secara delegatif. Insentif izin penangkaran tidak diberikan kepada pendata satwa *Chloropseidae*, melainkan hanya diberikan insentif berupa pengecekan satwa tanpa dipungut biaya. Berubahnya status konservasi satwa *Chloropseidae* tidak mempengaruhi pelanggaran hukum yang dilakukan terhadap satwa *Chloropseidae*, maka perubahan pengaturan wewenang penerbitan izin penangkaran maupun kewajiban pendataan satwa tidak mempengaruhi kelestarian satwa *Chloropseidae* secara signifikan.

Kata Kunci: Pengaturan wewenang, Izin Penangkaran, satwa *Chloropseidae*.

ABSTRACT

The conservation status change of Chloropseidae into protected obliges Chloropseidae registration ownership by Natural Resources Conservation Agency of Central Java Province. The obligation to registry the ownership of Chloropseidae are given incentives in the form of captive permit. The purpose of this research is, first, to analyze the legal status of Chloropseidae as protected animals. Second, to understand the authority regulation of the Nature Resources Conservation Agency of Central Java Province in its relation to the captive permit. Third, to understand the practice of the obligation of protected birds registration, bird captive permit recommendations, and the law enforcement of Chloropseidae ownership by the Nature Resources Conservation Agency of Central Java Province.

The research type is juridical nondoctrinal with the interactional-symbolic approach method. The author analyzed the conducted research descriptive-analytically and concludes the research with the induction syllogism.

Conservation status is a form of moral obligation that are set forth in statutory regulations to provide special protection toward animals. Only conservation status based on the Republic of Indonesia Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Living Natural Resources and Their Ecosystems is legally binding toward Chloropseidae. Natural Resources Conservation Agency of Central Java Province is not authorized to issue bird captive permit after the enactment of Online Single Submission, but authorized to issue bird captive permit recommendation. The authority to issue bird captive permit is obtained attributively, while the Investment Coordinating Board that organizes the Online Single Submission has the authority to issue bird captive permit delegatively. Captive permit incentives are not given to Chloropseidae ownership registrant, only incentives in the form of free of charge animal checking are given. The change of Chloropseidae's conservation status does not affect legal violations committed against Chloropseidae, thus authority regulations of captive permit issue nor the obligation to registry animal does not significantly affect the preservation of Chloropseidae.

Keyword: *Authority regulations, Captive Permit, Chloropseidae.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II WEWENANG DAN TINDAKAN HUKUM PEMERINTAH: DASAR OTORITAS BAGI UPAYA PELESTARIAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (Sebuah Tinjauan Pustaka)	15
A. Wewenang Pemerintah: Perspektif Dogmatif dan Praktis Yuridis.....	15
1. Wewenang Pemerintah sebagai Landasan Tindakan Hukum Pemerintah	15
2. Cara Perolehan Wewenang Pemerintah.....	21
3. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (Balai KSDA) Jawa Tengah sebagai Badan Pemerintahan yang Memiliki Wewenang Pemerintah	24

B.	Perizinan (<i>Vergunning</i>): Bentuk dan Karakteristik Tindakan Hukum Pemerintah	28
1.	Perizinan sebagai Bentuk Perkenaan Tindakan Masyarakat	28
2.	Izin Penangkaran sebagai Bentuk Konservasi Satwa: Perspektif Yuridis Teoretis	35
C.	Konservasi dan Pelestarian Keanekaragaman Hayati: Perspektif Etimologis, Disiplin Keilmuan, dan Kelembagaan.....	36
1.	Definisi Keanekaragaman Hayati	36
2.	Pelestarian Keanekaragaman Hayati: Perspektif Regulasi dan Kelembagaan	37
3.	Status Konservasi Satwa sebagai Upaya Konservasi terhadap Pelestarian Keanekaragaman Hayati	40
BAB III METODE PENELITIAN		53
A.	Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan	53
B.	Spesifikasi Penelitian	55
C.	Jenis Data dan Sumber Data	56
D.	Metode Pengumpulan Data.....	60
E.	Metode Analisis Data.....	63
F.	Metode Pengambilan Simpulan	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		66
A.	Status Hukum Satwa <i>Chloropseidae</i> sebagai Satwa yang Dilindungi....	66
1.	Definisi Terma Satwa, Hewan, dan Binatang	66
2.	Status Konservasi sebagai Status Hukum Satwa yang Dilindungi ...	69
3.	Status Konservasi Satwa <i>Chloropseidae</i>	83
B.	Dasar Pertimbangan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (Balai KSDA) Jawa Tengah dalam Pemberian Izin Penangkaran Burung	107

1. Pengaturan Wewenang Penerbitan Izin Penangkaran Burung.....	107
2. Dasar Pertimbangan Kepala Balai KSDA Jawa Tengah dalam Pemberian Rekomendasi Izin Penangkaran Burung	118
C. Praktik Pendataan Burung, Pemberian Rekomendasi Penangkaran Burung, dan Penegakan Hukumnya oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (Balai KSDA) Jawa Tengah.....	126
1. Praktik Pendataan Burung dan Penerbitan Rekomendasi Penangkaran Burung Satwa <i>Chloropseidae</i> oleh Balai KSDA Jawa Tengah	126
2. Penegakan Hukum terhadap Satwa <i>Chloropseidae</i> oleh Balai KSDA Jawa Tengah.....	136
BAB V PENUTUP	144
A. Simpulan	144
B. Saran	147
DAFTAR PUSTAKA	149
LAMPIRAN	161

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbedaan Delegasi dan Mandat

Tabel 2 Perbandingan Status Konservasi Satwa *Chloropseidae* berdasarkan UU RI 5/1990, *CITES*, dan *IUCN Red List*